



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Asasi  
Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim: Studi Kasus  
Perbandingan antara Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur**

Skripsi

Oleh

Marcelina Adelia Swardhie

2016330254

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Asasi  
Manusia yang Dihadapi Etnis Minoritas Muslim: Studi Kasus  
Perbandingan antara Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur**

Skripsi

Oleh

Marcelina Adelia Swardhie

2016330254

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Marcelina Adelia Swardhie  
Nomor Pokok : 2016330254  
Judul : Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim: Studi Kasus Perbandingan antara Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 27 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. :

**Sekretaris**

Idil Syawfi, S.IP., M.Si. :

**Anggota**

Mangadar Situmorang, Ph.D. :

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marcelina Adelia Swardhie  
NPM : 2016330254  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim: Studi Kasus Perbandingan antara Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Juli 2020



Marcelina Adelia S.

## ABSTRAK

Nama : Marcelina Adelia Swardhie

NPM : 2016330254

Judul : Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim: Studi Kasus Perbandingan antara Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur

---

Indonesia dengan sistem politik bebas-aktif dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya telah berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia, termasuk dengan menangani masalah-masalah kemanusiaan. Sementara itu, Islam yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya membuat Indonesia seringkali mengangkat berbagai konflik yang melibatkan umat Muslim, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang dialami Muslim Rohingya di Myanmar. Meski mendapatkan perlakuan serupa, Indonesia tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap Muslim Uyghur di RRT. **Mengapa terdapat adanya perbedaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis minoritas Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur?** Penulis menggunakan konsep *Agent-Structure* yang menguraikan pengaruh *power* untuk berbagai *agent* di dalam *structure* dengan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena ini—menghasilkan kesimpulan bahwa *power* mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis minoritas Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur.

**Kata Kunci:** Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, Pelanggaran HAM, Etnis Minoritas, Rohingya, Uyghur, Islam, *Power*

***ABSTRACT***

Name : Marcelina Adelia Swardhie

NPM : 2016330254

Title : *Indonesian Foreign Policy Against Human Rights Violations on Muslims Minorities: A Comparative Case Study on the Rohingyas and the Uyghurs*

---

Indonesia with its ‘free and active’ foreign policy has committed to create world peace, this includes dealing with humanitarian issues. Moreover, Islam that influenced its foreign policy has made Indonesia even vocals in the conflicts involving the Muslims, like the human rights violations faced by the Rohingyas. However, Indonesia doesn’t give the same assistance to the Uyghurs, a Muslim ethnic minority that also dealt with the similar treatment as the Rohingyas. **Why are there differences in Indonesian foreign policy regarding the human rights violations experienced by the Rohingyas and the Uyghurs?** The writer uses Agent-Structure concept that describes power’s influence on various agents in the structures, combining it with the qualitative research method to explains this phenomenon—resulted in a conclusion that power affects the Indonesian foreign policy related to the human rights violations faced by the Rohingyas and the Uyghurs.

**Keywords:** *Indonesia, Foreign Policy, Human Rights Violation, Ethnic Minority, Rohingya, Uyghur, Islam, Power*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan pada Tuhan, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul **“Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim: Studi Kasus Perbandingan antara Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur”**. Penelitian ini dibuat sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih mempunyai berbagai keterbatasan. Maka dari itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini.

Bandung, 12 Juli 2020

Marcelina Adelia S.

## UCAPAN TERIMA KASIH

- Untuk Mama dan Papa: Terima kasih karena sudah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih karena telah memastikan *well-being* penulis selama mengerjakan skripsi di tengah pandemi ini melalui sambungan telepon. Terima kasih juga atas nasihat dan petuah berharga yang diberikan pada penulis. Niscaya, pesan Mama dan Papa akan selalu penulis ingat dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- Untuk keluarga penulis, terutama keluarga Jakarta: Terima kasih karena sudah memberikan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena kalian selalu mengingatkan penulis untuk tidak bermalas-malasan dan berusaha membantu menyediakan kebutuhan penulis selama mengerjakan skripsi ini.
- Untuk dosen pembimbing dan penguji: Terima kasih, Mas Idil, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih karena telah menyediakan waktu untuk mengarahkan dan memberikan masukan-masukan pada penulis selama mengerjakan skripsi ini. Terima kasih, Mas Adrianus dan Mas Mangadar, selaku dosen penguji penulis atas masukan-masukannya dalam proses revisi. Adalah sebuah kebanggaan bagi penulis untuk kesempatan yang diberikan untuk *bekerjasama* dengan orang-orang hebat seperti Mas Idil, Mas Adrianus, dan Mas Mangadar. Terima kasih.
- Untuk Alm. Mas Bob dan Alm. Mas Nur: Terima kasih karena sudah memberikan ilmu-ilmu yang berharga bagi penulis, baik ilmu sehubungan dengan studi maupun ilmu kehidupan. Terima kasih, Mas Bob, karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjadi salah satu dari *ten lucky bastards* di kelas *Security Studies*—sebuah pengalaman berharga bagi penulis, terutama untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam mengemukakan ide dan memberikan argumen. Terima kasih, Mas Nur,

karena telah memberikan kelas-kelas yang tidak pernah membosankan. Gurauan-gurauan khas Mas Nur menjadi hiburan selama masa studi penulis di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis akan selalu mengingat kenangan-kenangan bersama Mas Bob dan Mas Nur.

- Untuk dosen-dosen Hubungan Internasional yang pernah membimbing penulis selama belajar di Universitas Katolik Parahyangan: Mas Pur, Mba Yasmin, Mas Apres, Mba Suke, Mba Sylvi, Mas Irawan, Mba Mirei, Mba Ratih, Mas Nyoman, Mba Vrames, Mas Giandi, Mas Nara, Mba Anggi, Mas Mangadar, Mba Indri, Mba Nophie, Mba Jessica, Bang Atom, dan Bang Tian. Terima kasih atas ilmu berharga yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berhutang pada Mas dan Mba semua.
- Untuk sahabat-sahabat penulis: Caroline Halim, Audri Pelangi, Gabriella Carmen, Michelle Patricia, Melinda Lastri, Robby Cahyadi, Hanna Kirana, Billy Adhpoe. Terima kasih karena telah mewarnai hari-hari penulis selama empat tahun masa studi di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih Audri, Carmen, Oline, dan Michelle—teman begadang penulis selama mengerjakan skripsi di Bandung. Penulis akan merindukan segala kebersamaan dan gosip-gosip tengah malam hingga pagi di McDonald's. Semoga semua ini bisa terulang lagi nanti. Terima kasih Robby karena bersedia mengantar dan menjemput penulis selama berada di Bandung. Terima kasih juga atas segala bantuan yang telah diberikan pada penulis, termasuk diskusi-diskusi akademis untuk menunjang studi penulis. Terima kasih juga pada Melinda, Hanna, dan Billy *for being such a great friends*. Terima kasih, semuanya, karena telah memberikan dukungan moral pada penulis selama empat tahun ini. Penulis merasa bahagia bisa mengenal kalian semua.
- Untuk teman-teman ghibah dan sambatku: Felicia Sutanto, Kak Daisy, Kak Geka, Kak Sistha. Terima kasih karena telah menjadi tempat penulis

bersandar, terutama selama penulis berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena sudah memberikan dukungan moral yang besar maupun menjadi *tempat sampah* untuk segala keluh kesah penulis di kehidupan sehari-hari.

- Untuk teman delegasi Equatorial Guinea, Sobat EG: Audri Pelangi, Gabriella Carmen, Caroline Halim, Michelle Patricia, Rika Amelinda, Satrio Negoro, Saskia Indrawati, Timotius Elmo, Valentino Sudiby, dan Valerie Priscilla. Terima kasih karena kalian bersedia menjadi rekanan penulis selama Praktik Diplomasi. Seperti yang sudah pernah penulis katakan, *Diplomacy in Practice will not be the same without you*. Kalian semua membuat proses ini terasa menyenangkan. Jadi, sekali lagi, terima kasih.
- Untuk teman-teman HI 2016: Terima kasih atas perjuangan dan kebersamaannya selama tiga setengah sampai empat tahun ini. Meskipun penulis tidak mengenal sebagian besar dari kalian, penulis tetap merasa bahwa kalian merupakan bagian dari perjalanan penulis di Universitas Katolik Parahyangan. Semoga kita bisa kembali bertemu di lain waktu.
- Untuk UKM Unpar Choir: Terima kasih atas kesempatan dan pengalaman yang diberikan. Tidak sekalipun penulis pernah membayangkan bahwa penulis akan mampu berdiri di atas panggung dan ditonton ratusan orang maupun tampil di hadapan seorang presiden dan orang-orang penting lain. Penulis juga tidak pernah sekalipun bermimpi untuk berkolaborasi bersama salah satu musisi yang penulis kagumi, *but you made it all happened*. Jadi, terima kasih, Unpar Choir.
- Untuk orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu: Terima kasih atas segala sesuatu yang telah kalian lakukan untuk penulis. Tanpa kalian semua, penulis tidak akan menjadi penulis yang sekarang.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3. Pertanyaan Penelitian.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Kajian Literatur.....	8
1.5. Kerangka Pemikiran.....	11
1.6. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	17

1.6.1. Metode Penelitian.....	17
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.7. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DIHADAPI ETNIS MINORITAS ROHINGYA DAN UYGHUR.....</b>	<b>22</b>
2.1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.....	22
2.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Uyghur di Tiongkok...33	
2.3. Indonesia dan Masyarakat Indonesia dalam Menyikapi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim.....	40
2.3.1. Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim .....	41
2.3.2. Masyarakat Indonesia dalam Menyikapi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim.....	45
<b>BAB III: ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DIHADAPI ETNIS MINORITAS ROHINGYA DAN UYGHUR.....</b>	<b>48</b>
3.1. Perbandingan Posisi Negara dalam Komunitas Internasional.....	48
3.1.1. Perbandingan Posisi Indonesia dan Myanmar dalam Komunitas Internasional.....	49
3.1.2. Perbandingan Posisi Indonesia dan RRT dalam Komunitas Internasional.....	53
3.2. Analisis Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dihadapi Etnis Minoritas Muslim Rohingya dan Uyghur berdasar Perbandingan <i>Power</i> antara Indonesia-Myanmar dan Indonesia-RRT.....	58

3.2.1. Posisi Indonesia sebagai <i>Agent</i> dalam Struktur di Asia Tenggara terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim Rohingya.....	60
3.2.2. Posisi Indonesia sebagai <i>Agent</i> dalam Struktur di Asia terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim Uyghur.....	65
<b>BAB IV: KESIMPULAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Persentase Kematian Etnis Minoritas Rohingya (25 Agustus 2017 - 24 September 2017).....	31
Tabel 2.2. Perbandingan Perbedaan Tindakan yang Dilakukan Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar dan RRT.....	45
Tabel 3.1. Perbandingan Ekonomi antara Indonesia dan Myanmar (2011).....	50

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1. Angka Harapan Hidup Etnis Minoritas Rohingya (Mingguan) Tahun 2017.....	31
---	----

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Pemukiman Rohingya yang Terbakar (21 September 2017).....30

**DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM**

AIIB	<i>China-led Asian Investment Infrastructure Bank</i>
ASE FMM	<i>Asia Europe Meeting Foreign Minister Meeting</i>
ASEAN	<i>Association of South East Asian Nations</i>
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BRI	<i>Belt and Road Initiative</i>
CDB	<i>Chinese Development Bank</i>
DK	Dewan Keamanan
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
HCI	<i>Human Concern International</i>
ICRC	<i>International Committee of the Red Cross</i>
KCIC	Kereta Cepat Indonesia China
Kedubes	Kedutaan Besar
OKI	Organisasi Konferensi Islam
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
TPF	Tim Pencari Fakta
UN	<i>United Nations</i>
UNSC	<i>United Nations Security Council</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menggunakan sistem politik bebas-aktif dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya.<sup>1</sup> Pada masa awal kemerdekaan, melalui politik bebas-aktif, Indonesia menjanjikan dukungan pada negara-negara yang kesulitan dalam meraih kemerdekaan sementara kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika juga diberitakan secara luas untuk menghapus segala bentuk kolonialisme.<sup>2</sup> Sekarang, bebas-aktif berarti Indonesia bebas menentukan kebijakan luar negerinya untuk memajukan kepentingan nasional dan berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia,<sup>3</sup> termasuk dengan menangani masalah-masalah kemanusiaan.

Indonesia secara resmi mengakui enam agama: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 207 juta orang (87,2%) merupakan umat Muslim.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rizal Sukma, "Indonesia's Bebas-Aktif Foreign Policy and the 'Security Agreement' with Australia," *Australian Journal of International Affairs* 51, No. 2 (1997): 231.

<sup>2</sup> Franklin B. Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto* (Singapore: Equinox Publishing, 2007), 162-163.

<sup>3</sup> "Politik Bebas Aktif Indonesia Masih Relevan," Universitas Gadjah Mada, 7 September 2018, diakses pada tanggal 7 Juli 2020,

<https://ugm.ac.id/id/berita/16997-politik-bebas-aktif-indonesia-masih-relevan>

<sup>4</sup> "Agama," Portal Informasi Indonesia, diakses pada tanggal 17 September 2019, <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>

Angka tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.<sup>56</sup> Walaupun mayoritas penduduknya beragama Muslim, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Namun dalam aspek kultural dan personal, Islam mempunyai keistimewaan tersendiri dalam diri masyarakatnya sehingga seringkali mempengaruhi *interest* negara, termasuk dalam kebijakan luar negerinya.<sup>7</sup>

Pada 8 Juni 2018, Indonesia terpilih untuk menjadi anggota non-permanen *United Nations Security Council* (UNSC). Indonesia akan menjabat selama dua tahun, dimulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Dalam pernyataan melalui perwakilannya di *United Nations* (UN) New York, Dian T. Djani, Indonesia menunjukkan komitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia.<sup>8</sup> Salah satunya dengan mengangkat konflik-konflik yang melibatkan umat Muslim, contohnya Muslim Rohingya.<sup>9</sup>

Meskipun telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan mengangkat konflik-konflik yang melibatkan umat Muslim, Indonesia memiliki perbedaan perlakuan dalam menangani pelanggaran hak asasi

---

<sup>5</sup> Melve C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200 (Edisi Ketiga)*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001), 379.

<sup>6</sup> The Pew Forum on Religion and Public Life, *Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population*, (Washington: Pew Research Center, 2009), 28-33.

<sup>7</sup> Rizal Sukma, *Islam in Indonesian Foreign Policy* (London & New York: Routledge Curzon, 2004), 4-5.

<sup>8</sup> "Indonesia Membership on the UN Security Council," Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, diakses pada tanggal 17 September 2019, [https://kemlu.go.id/portal/en/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/indonesian-membership-on-the-un-security-council](https://kemlu.go.id/portal/en/read/147/halaman_list_lainnya/indonesian-membership-on-the-un-security-council)

<sup>9</sup> Editorial Board of the Jakarta Post, "Endless Debate on UN Reform," *The Jakarta Post*, 5 Juli 2019, diakses pada tanggal 17 September 2019, <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/07/05/endless-debate-on-un-reform.html>

manusia yang dialami Muslim Uyghur. Hal ini terjadi karena keberadaan faktor-faktor tertentu sehingga Indonesia tidak dapat mengambil tindakan yang sama melalui kebijakan luar negerinya.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Deskripsi Masalah**

Setiap orang memiliki hak asasi manusia atau hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasar martabatnya. Hak asasi manusia menjelaskan hubungan antar individu dan struktur *power*, terutama negara. Ia membatasi kekuatan negara dan menuntutnya untuk menciptakan lingkungan yang membuat setiap orang mampu menikmati hak asasi manusianya.<sup>10</sup> *Universal Declaration of Human Rights Article 1* menyatakan bahwa setiap manusia terlahir bebas dan memiliki martabat juga hak yang sama, *Article 2* menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kebebasan tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, tempat asal, atau status-status lainnya.<sup>11</sup>

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, seperti yang terjadi pada Muslim Rohingya di Myanmar.<sup>12</sup> Indonesia telah berperan aktif

---

<sup>10</sup> Inter-Parliamentary Union, "Human Rights Handbook for Parliamentarians No. 26," *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, (Tignieu-Jameyzieu: Courand et Associés, 2016), 19.

<sup>11</sup> "Universal Declaration of Human Rights," United Nations, diakses pada tanggal 18 September 2019, [https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr\\_booklet\\_en\\_web.pdf](https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf)

<sup>12</sup> Md. Ziaur Rahman, Jhensanam Anusara, Bouasone Chanthamith, Md. Saddam Hossain, Md. Al Amin, dan Arifin Sultana, "Rohingya Crisis: Identity of Rohingya Muslim in Myanmar," *International Research Journal of Science* 7, No. 12 (2018): 12.

dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan Muslim Rohingya. Pada 6 Desember 2016, melalui pertemuannya dengan *State Counsellor* Myanmar Aung San Suu Kyi, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan kekhawatiran Indonesia sehubungan dengan masalah tersebut. Dalam pertemuan itu, Indonesia juga menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan untuk dicapai demi perkembangan Rakhine. Indonesia pun berharap bahwa pemerintah Myanmar dapat menjunjung hak asasi manusia untuk orang-orang Rakhine, termasuk minoritas Muslim Rohingya.<sup>13</sup>

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, sebagai perwakilan Indonesia di dunia internasional juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan diplomasi untuk membantu konflik kemanusiaan yang sedang dihadapi Muslim Rohingya. Indonesia juga meminta masukan pemuka-pemuka agama dan organisasi-organisasi Islam untuk menemukan solusi terbaik bagi Muslim Rohingya.<sup>14</sup> Pada 4 September 2017, Menteri Luar Negeri Indonesia kembali menemui *State Counsellor* Myanmar untuk membicarakan penyelesaian konflik Rohingya, memberikan empat anjuran: mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan;

---

<sup>13</sup> Tama Salim, "Indonesia Raises Rohingya Concerns with Suu Kyi: Retno," *The Jakarta Post*, 8 Desember 2016, diakses pada tanggal 17 September 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2016/12/08/indonesia-raises-rohingya-concerns-with-suu-kyi-retno.html>

<sup>14</sup> News Desk, "Indonesia Carries Out Intensive Diplomacy on Rohingya: Minister," *The Jakarta Post*, 2 Januari 2017, diakses pada tanggal 17 September 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2017/01/02/indonesia-carries-out-intensive-diplomacy-on-rohingya-minister.html>

melindungi semua orang Rakhine, tanpa memandang suku dan agama; dan membuka akses untuk bantuan keamanan.<sup>15</sup>

Sehari setelahnya, Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan perjalanan menuju Dhaka, Bangladesh, untuk menemui Menteri Luar Negeri Bangladesh—membicarakan masalah pengungsi Rohingya.<sup>16</sup> Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan pada Januari dan Februari 2017 juga merencanakan pembangunan rumah sakit untuk membantu orang-orang Rohingya di bulan Oktober 2017.<sup>17</sup> Indonesia telah menampung sebanyak 1.722 orang pengungsi Rohingya pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia juga membangun dan meresmikan dua sekolah di La Mae Chae dan Thet Kay Pyia pada 21 Januari 2017. Sekolah lain di Desa Bokhar Pala dibangun dengan kerjasama antara *Human Concern International* (HCI) dan Rumah Zakat.<sup>18</sup>

Indonesia masih menyerukan krisis kemanusiaan yang dialami Muslim Rohingya pada tahun 2019, termasuk dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di

---

<sup>15</sup> “Menlu RI Serahkan Formula, Pelapor Khusus PBB dan Malala Kritik Suu Kyi,” BBC News, 4 September 2017, diakses pada tanggal 2 Maret 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41147802>

<sup>16</sup> Tama Salim, *Indonesia Raises Rohingya Concerns with Suu Kyi - Retno*.

<sup>17</sup> “Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar ‘Hentikan dan Cegah Kekerasan’,” BBC News, 3 September 2017, diakses pada tanggal 2 Maret 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41140890>

<sup>18</sup> Moh. Rosyid, “Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, No. 3 (2019): 614-634.

New York<sup>19</sup> dan Pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok.<sup>20</sup> Perlakuan yang sama tidak diberlakukan bagi Muslim Uyghur. Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menentang keras penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada Muslim Uyghur. Meski begitu, Indonesia tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hal ini dikarenakan adanya kedaulatan yang dimiliki setiap negara untuk mengatur wilayahnya masing-masing.<sup>21</sup>

### 1.2.2. Pembatasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah supaya bidang kajian bisa ditulis dengan lebih mendalam. Maka dari itu, dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan pembatasan—mencakup pembatasan aktor yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya dan Uyghur, yaitu Myanmar; RRT; Muslim Rohingya; dan Muslim Uyghur beserta Indonesia sebagai negara studi kasus perbandingan pembuatan kebijakan luar negeri. Selain itu, pembatasan latar tempat penelitian juga dilakukan, yakni di

---

<sup>19</sup> “FM Marsudi Urges to Stop Humanity Crisis in Rakhine State,” Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 25 September 2019, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/622/berita/fm-marsudi-urges-to-stop-humanity-crisis-in-rakhine-state>

<sup>20</sup> “Presiden Jokowi Sampaikan Pandangan bagi Pemulihan Situasi di Rakhine State,” Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 3 November 2019, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/749/berita/presiden-jokowi-sampaikan-pandangan-bagi-pemulihan-situasi-di-rakhine-state>

<sup>21</sup> “JK Tolak Penindasan terhadap Muslim Uighur di China,” CNN Indonesia, 17 Desember 2018, diakses pada tanggal 17 September 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181217140715-20-354266/jk-tolak-penindasan-terhadap-muslim-uighur-di-china>

Indonesia, Myanmar, dan RRT. Sementara itu, fokus penelitian ini hanya mengarah pada kebijakan luar negeri Indonesia dengan pernyataan-pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia dan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan Indonesia sehubungan dengan masalah tersebut.

### **1.2.3. Pertanyaan Penelitian**

Banyak perbedaan yang dapat dilihat pada tindakan yang diambil Indonesia dalam menghadapi dua kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis minoritas Muslim. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan penulis dalam Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Masalah, pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah: **“Mengapa terdapat adanya perbedaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis minoritas Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur?”**

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan membuktikan adanya pengaruh *power* dalam pengambilan keputusan yang dituangkan dalam kebijakan luar negeri, terutama kebijakan luar negeri Indonesia untuk menghadapi

pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis minoritas Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Hasil analisa dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lain dengan tema yang sama. Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktikal, yakni untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis minoritas Muslim, terutama Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan dalam penelitian maupun sumber wawasan untuk mengetahui adanya pengaruh *power* terhadap kebijakan luar negeri suatu negara.

### **1.4. Kajian Literatur**

Akademisi-akademisi memiliki beberapa pandangan berbeda sehubungan dengan peranan Indonesia dalam menghadapi berbagai konflik yang melibatkan umat Muslim dalam dunia internasional. Pertama, pandangan bahwa Indonesia mengambil keputusan-keputusan tertentu, termasuk melakukan tindakan-tindakan intervensionis untuk memberikan bantuan terhadap negara maupun etnis minoritas Muslim yang membutuhkan. Kedua, pandangan bahwa

Indonesia lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan-tindakan intervensionis bahkan berpihak pada aktor pelaku yang memusuhi negara maupun etnis minoritas Muslim karena faktor tertentu.

Tulisan dari Mohammad Rosyid, *Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar*, membahas tentang peranan Indonesia dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Indonesia dikatakan bersimpati pada etnis minoritas Muslim Rohingya sehingga melakukan usaha-usaha untuk membantu, diantaranya: memberi bantuan kemanusiaan dan diplomatik; membangun infrastruktur dasar, seperti sekolah dan rumah sakit untuk orang Rohingya; menampung para pengungsi; dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Tulisan dari Syarif Bahaudin Mudore, *Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina*, membahas peranan Indonesia dalam menghadapi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dikatakan bahwa Indonesia adalah penengah untuk menyelesaikan konflik antara dua negara dengan keberpihakan pada Palestina. Tindakan yang telah diambil Indonesia, antara lain: mengupayakan perlindungan dan penjaminan hak rakyat Palestina melalui UN—memprioritaskan konflik antara Israel dan Palestina dalam Dewan Keamanan (DK) UN; memutuskan untuk tidak menjalin kerjasama diplomatik dengan Israel sebagai bentuk dukungan dan solidaritas untuk Palestina; mengecam tindakan pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel; mengecam

---

<sup>22</sup> Moh. Rosyid, *Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar*, 614-634.

Israel atas pembangunan pemukiman-pemukiman Yahudi di Palestina; dan sebagainya.<sup>23</sup>

Tulisan dari Agus Salim, *Islamic Identity and Foreign Policy Discourse: Indonesia's Responses to the US War in Afghanistan (2001-2002)*, membahas bagaimana Indonesia melalui masyarakat mayoritas yang merupakan Muslim menggunakan identitasnya untuk memandang penyerangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan sebagai penyerangan terhadap Islam. Meski begitu, karena tekanan dan ancaman-ancaman tidak langsung dari Amerika Serikat, Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk mendukung gerakan *War on Terror* terhadap Afghanistan. Indonesia menekankan peperangan terhadap terorisme secara keseluruhan untuk mengendalikan keadaan dalam negeri setelah menerima banyak kritikan dari berbagai kelompok Muslim.<sup>24</sup>

Tulisan dari M. Muttaqien, *Domestic Politics and Indonesia's Foreign Policy on the Arab-Israeli Conflict*, secara keseluruhan membahas tentang pengaruh hubungan antara Indonesia dan negara-negara Arab terhadap kebijakan luar negerinya. Dalam tulisan ini, penulis menggarisbawahi Perang 1956 antara Mesir dan Israel yang bertempat di Terusan Suez. Indonesia memberikan dukungan untuk Mesir karena hubungan baik pemimpin dua negara. Meski begitu, Indonesia pada akhirnya mengirimkan personil militer untuk bergabung dalam *UN*

---

<sup>23</sup> Syarif Bahaudin Mudore, "Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina," *Jurnal CMES* 12, No. 2 (2019): 170-180.

<sup>24</sup> Agus Salim, "Islamic Identity and Foreign Policy Discourse: Indonesia's Responses to the US War in Afghanistan (2001-2002)," *Indonesian Journal for Islamic Studies* 27, No. 1 (2020): 35-65.

*Peacekeeping Forces*—bertugas mengamati keadaan sekaligus menengahi dua kubu yang berselisih.<sup>25</sup>

Literatur *Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar* dan *Domestic Politics and Indonesia's Foreign Policy on the Arab-Israeli Conflict* berpihak pada pandangan pertama. Sementara itu, literatur *Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina dan Islamic Identity and Foreign Policy Discourse: Indonesia's Responses to the US War in Afghanistan (2001-2002)* berpihak pada pandangan kedua. Penelitian ini sendiri memihak pada dua pandangan tersebut: Indonesia memiliki dua *stance* dalam kebijakan luar negerinya sehubungan dengan negara dan etnis minoritas Muslim, yaitu untuk melakukan tindakan intervensionis dan tindakan non-intervensionis bahkan berpihak pada aktor pelaku yang memusuhi negara maupun etnis minoritas Muslim—pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, salah satunya *power*.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Penulis menggunakan konsep *Agent-Structure* oleh Christopher Hill dalam menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi etnis minoritas Muslim. Konsep ini menggarisbawahi *agent* dan *structure* sebagai dua hal yang saling mempengaruhi dalam kebijakan

---

<sup>25</sup> M. Muttaqien, "Domestic Politics and Indonesia's Foreign Policy on the Arab-Israeli Conflict," *Global & Strategies* 7, No. 1 (2013): 57-69.

luar negeri.<sup>26</sup> Christopher Hill mengatakan bahwa pada masa sekarang, terjadi perdebatan tentang sejauh mana tanggung jawab negara dapat meluas pada *foreigners*—baik untuk kepentingan mereka maupun kepentingan diri sendiri. Kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan seberapa jauh upaya negara dalam mempengaruhi *framework* yang lebih luas dan seringkali berlawanan dengan *parochial concern* mereka.<sup>27</sup>

Selain itu, pengertian struktur, baik ekonomi, sosial-budaya maupun politik dengan fokus aktor operator transnasional dan negara juga harus diperhatikan dalam membuat kebijakan luar negeri. Negara-negara dengan *power* yang lebih kecil menyetujui bahwa kemakmuran dan kelangsungan hidup mereka tidak hanya dipengaruhi usaha-usaha serta aktivitas kolektif dengan sekutu-sekutunya, melainkan juga *nature* dari sistem internasional dengan peraturan, norma, dan institusinya sendiri.<sup>28</sup> Kebijakan luar negeri bertujuan untuk memediasi dampak eksternal terhadap keadaan domestik dan menemukan cara untuk memproyeksikan *particular set of concerns* dunia pada masyarakat—menunjukkan adanya ketergantungan antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional.<sup>29</sup> Hal ini kemudian membentuk konsep yang digunakan penulis.

---

<sup>26</sup> Christopher Hill, *Foreign Policy in the Twenty-First Century* (London: Palgrave Macmillan, 2016), 32-43.

<sup>27</sup> Christopher Hill, "What is to be Done? Foreign Policy as a Site for Political Action," *International Affairs* 79, No. 2 (2003): 233-249.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Christopher Hill, *Foreign Policy in the Twenty-First Century*, 32-43.

*Structure* merupakan faktor-faktor yang menciptakan lingkungan dimana *agent* beroperasi—membentuk *nature of choices* dengan menetapkan batas kemungkinan, tetapi juga dengan menentukan *nature of problems* yang dapat terjadi. *Structure* ada pada setiap tingkatan sosial, mulai dari keluarga sampai sistem internasional, dan merepresentasikan proses atau pola interaksi. Meski begitu, *structure* dalam hubungan internasional dapat diartikan sebagai eksistensi sistem internasional, tekanan internasional, dan *great powers* yang dapat mempengaruhi pembentukan juga pelaksanaan kebijakan luar negeri. *Structure* seringkali mewakili proses atau pola-pola interaksi dan secara konsisten dipengaruhi oleh *agent*.<sup>30</sup>

Sementara itu, *agent* adalah entitas yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri dengan menilai dan mempertimbangkan kapasitas negara yang merupakan karakteristik internal negara, meliputi kondisi politik; kapabilitas militer; pengaruh *interest groups*; tingkat otonomi daerah; pandangan pemimpin negara terhadap *international opportunities and threats*; kebijakan dalam negeri yang sedang dijalankan pemimpin negara; dan *intangible power*. Peranan *agent* dapat diberikan pada individu maupun sekelompok individu—mengacu pada elit politik dan pemerintah dalam suatu negara sekaligus aktor-aktor lain yang bersangkutan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy* (London: Palgrave Macmillan, 2003), 25-30.

<sup>31</sup> *Ibid.*

*Agent* dan *structure* saling berhubungan untuk membentuk proses interaksi yang berkesinambungan sementara pembuatan kebijakan luar negeri merupakan proses interaksi yang kompleks antara banyak aktor. Interaksi ini kemudian akan membentuk suatu proses dinamis yang mengarah pada evolusi konstan antara *structure* dan *agent*. Negara adalah *agent* paling berpengaruh dalam mobilisasi politik dengan negara paling *powerful* menjadi pengambil inisiatif untuk menentukan keputusan.<sup>32</sup> *Power* merupakan sebuah konsep dasar ilmu politik sekaligus pilar utama Hubungan Internasional. George Modelski, melalui *A Theory of Foreign Policy*, mencoba untuk mengutarakan pendapat bahwa *power* adalah salah satu *currency* yang digunakan para pembuat kebijakan luar negeri.<sup>33</sup>

Negara-negara *superpower* memiliki kapasitas untuk bertindak juga potensi untuk mengubah keseluruhan sistem. Di lain sisi, pengaruh yang dimiliki *middle power* hanya terbatas pada wilayah tertentu dan / atau *issue-area*. Terdapat tiga dimensi *power* dalam hubungan internasional, yaitu *power as an end*; *power as a currency or means*; dan *power as a context or structure*. Dalam *power as an end*, politisi memandang aktor sebagai sarana untuk memaksimalkan *personal power* mereka; kepuasan psikologis yang disebabkan oleh kontrol terhadap orang lain; serta *glory*, uang, dan peluang yang didapatkan dari *power* tersebut. *Power*

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*, 129-134.

*as a currency or means* secara eksplisit membahas tentang eksistensi *power* sebagai cara untuk mencapai tujuan.<sup>34</sup>

*Power as a context or structure* menyatakan bahwa aktor kebijakan luar negeri bekerja dalam lingkungan di mana mereka tidak dapat mengabaikan *power*. Negara tidak hanya memiliki kepentingan *subsidiary* dalam hubungan internasional, melainkan juga masalah kepentingan intelektual karena distribusi *power* yang tidak merata. *Agent* yang mengabaikan kepraktisan konteks *power* menghadapi tantangan yang lebih besar sekaligus dinilai signifikan dalam pemahaman terhadap *structure*. Susan Strange berpendapat bahwa *structural power* bersifat fundamental dan memiliki empat struktur utama dalam hubungan internasional, yakni: keamanan, perdagangan, informasi, juga kekayaan. Apabila sebuah negara mampu mendominasi *structure*, maka negara tersebut akan memiliki peran *decisive* di dunia internasional. Dalam hal ini, *agent* tidak hanya harus mengatasi *power* dari struktur tempat mereka beroperasi, tetapi juga menghadapi masalah mengenai siapa yang memiliki *power* untuk mengatur struktur tersebut.<sup>35</sup>

Selain konsep *Agent-Structure*, penulis juga menggunakan teori *World-System* untuk mendukung argumen. Immanuel Wallerstein berpendapat bahwa *world-system* merupakan sistem sosial yang mempunyai batasan, struktur, anggota, peraturan sah, dan koherensi.<sup>36</sup> *World-system* juga seringkali

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Immanuel Wallerstein, *The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* (New York: Academic Press, 1974), 347.

diasosiasikan dengan *world-economy* di mana paling sedikit dua negara cenderung saling bergantung satu sama lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ide dasar teori *World-System* berasal dari analisa *core-peripheral* dimana perdagangan internasional bukanlah perdagangan antar negara-negara yang memiliki kapabilitas serupa.<sup>37</sup>

Beberapa negara mempunyai ekonomi yang lebih kuat daripada sebagian negara lain—membuat negara-negara tersebut mampu menentukan persyaratan yang menguntungkan untuk mereka dalam perdagangan internasional sehingga menyebabkan terjadinya *unequal exchange*<sup>38</sup> pada proses akumulasi modal pada skala global.<sup>39</sup> *World-system* sendiri mengacu pada *division of labour* transnasional<sup>40</sup> yang menjadi pemicu pertukaran internal barang-barang pokok dan esensial beserta aliran modal dan tenaga kerja,<sup>41</sup> terbagi ke dalam tiga kategori: *core*, *semi-periphery*, dan *periphery*.<sup>42</sup>

Daftar negara *core* biasanya diisi oleh negara-negara maju; negara *periphery* ditempati oleh negara-negara paling *less developed*<sup>43</sup> yang tidak dapat berbuat banyak untuk mempengaruhi *axial division of labour* sehingga terpaksa menerima apapun yang diberikan pada mereka; kategori *semi-periphery* memiliki

---

<sup>37</sup> Walter L. Goldfrank, "Paradigm Regained? The Rules of Wallerstein's World-System Method," *Journal of World-System Research* 6, No. 2 (2000): 167.

<sup>38</sup> Immanuel Wallerstein, *World-Systems Analysis: An Introduction* (Durham: Duke University Press, 2004), 12.

<sup>39</sup> Carlos A. Martinez-Vela, "World Systems Theory," *Massachusetts Institute of Technology*, diakses pada tanggal 6 Juni 2020, <http://web.mit.edu/esd.83/www/notebook/WorldSystem.pdf>

<sup>40</sup> Thomas Barfield, *The Dictionary of Anthropology* (Hoboken: Wiley-Blackwell, 1997), 498-499.

<sup>41</sup> Immanuel Wallerstein, *World-Systems Analysis: An Introduction*, 23.

<sup>42</sup> Thomas Barfield, *The Dictionary of Anthropology*, 498-499.

<sup>43</sup> Christopher Chase-Dunn dan Peter Grimes, "World-System Analysis," *Annual Review of Sociology* 21 (1995): 389.

percampuran proses dan mengakibatkan posisi mereka lebih sulit daripada dua kategori lain—menerima tekanan dari negara-negara *core* dan mengupayakan segala sesuatu supaya tidak menjadi negara *periphery* sekaligus mengupayakan pembangunan. Negara *semi-periphery* inilah yang mengedepankan kebijakan paling agresif dan terbuka untuk mencapai pembangunan ekonomi demi bersaing dengan negara *semi-periphery* lainnya.<sup>44</sup> Negara dalam kategori *semi-periphery* berperan sebagai penengah di antara negara *core* yang pada umumnya mendominasi dan mengeksploitasi dua kategori dibawahnya dan negara *periphery*.<sup>45 46</sup>

## 1.6. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan rumusan masalahnya. Metode penelitian kualitatif biasanya dimulai dengan asumsi, pandangan, penggunaan lensa teoritis, dan studi masalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif, dibutuhkan banyak data kualitatif yang nantinya akan digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan penelitian.<sup>47</sup> Metode

---

<sup>44</sup> Immanuel Wallerstein, *World-Systems Analysis: An Introduction*, 29-30.

<sup>45</sup> Theda Skocpol, "Wallerstein's World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique," *American Journal of Sociology* 82, No. 5 (1977): 1077.

<sup>46</sup> Christopher Chase-Dunn dan Peter Grimes, *World-System Analysis*, 389.

<sup>47</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2007), 37.

penelitian kualitatif dilakukan tanpa menggunakan data numerik untuk menganalisa data<sup>48</sup> dengan langkah sebagai berikut: membuat pertanyaan penelitian, memilih subjek dan mengumpulkan data yang relevan, menginterpretasi data, menghubungkan data dengan teori yang digunakan, kemudian menulis kesimpulan.<sup>49</sup>

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *analytic induction*, dimulai dari proses perumusan pertanyaan penelitian, pembuatan hipotesis, dan dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data untuk menemukan penjelasan dari hipotesis.<sup>50</sup> Dokumen merupakan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian.<sup>51</sup> Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui narasumber sementara data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan orang lain untuk berbagai macam tujuan.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, data-data primer akan didapatkan melalui *website* resmi pemerintahan dan instansi yang berhubungan. Selain data-data primer, data-data sekunder akan didapatkan melalui jurnal, literatur akademik, buku, artikel, dan

---

<sup>48</sup> Alan Bryman, *Social Research Methods* (Oxford: Oxford University Press, 2021), 380.

<sup>49</sup> *Ibid*, 384.

<sup>50</sup> *Ibid*, 566-567.

<sup>51</sup> *Ibid*, 542.

<sup>52</sup> R. Burke Johnson dan Larry Christensen, *Educational Research: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2020), 203.

berita dari portal-portal terpercaya yang membahas tentang permasalahan Muslim Rohingya, Muslim Uyghur, juga peran-peran pemerintah Indonesia, Myanmar, dan RRT dalam permasalahan tersebut.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara sistematis terbagi ke dalam empat bagian berbeda. Bagian pertama, yaitu **Pendahuluan** berisi pemaparan masalah sehubungan dengan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis minoritas Muslim. Bagian pertama terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penelitian. Bagian pertama berguna untuk memberikan gambaran bagi pembaca mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian sekaligus kondisi *ideal* yang dapat dilakukan Indonesia untuk menangani permasalahan tersebut.

Bagian kedua, **Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dihadapi Etnis Minoritas Rohingya dan Uyghur**, berisi penjelasan dan deskripsi yang lebih mendalam mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur. Bagian kedua ini juga membahas kebijakan-kebijakan beserta upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menengahi konflik tersebut, terdiri dari Pelanggaran Hak Asasi

Manusia terhadap Etnis Rohingya di Myanmar, Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Uyghur di Tiongkok, dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim.

Bagian ketiga, **Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dihadapi Etnis Minoritas Rohingya dan Uyghur**, berisi analisis kasus berdasarkan teori yang diimplementasikan pada topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis menggunakan konsep *Agent-Structure* oleh Christopher Hill dan teori *World-Systems* oleh Immanuel Wallerstein untuk menganalisis peranan *power* dalam pengambilan keputusan negara dengan membandingkan dua kasus serupa. Bagian ketiga ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Perbandingan Posisi Negara dalam Komunitas Internasional dan Analisis Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dihadapi Etnis Minoritas Muslim Rohingya dan Uyghur berdasar Perbandingan *Power* antara Indonesia-Myanmar dan Indonesia-RRT.

Bagian terakhir, yaitu **Kesimpulan** sekaligus penutup dari penelitian ini berisi kesimpulan dari analisis penelitian yang telah dilakukan pada topik Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Etnis Minoritas Muslim: Studi Kasus Perbandingan antara Muslim Rohingya dan Muslim Uyghur. Bagian ini menyajikan hasil akhir atau jawaban

dari pertanyaan penelitian melalui data yang telah diproses dengan mengaplikasikan teori.